

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA

Bobby G. H. Kangmartono

(Program Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat)

Meina Wulansari Yusniar

(Universitas Lambung Mangkurat)

Sufi Jikrillah

(Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the influence of Corporate Governance (CG) mechanism consisting of Capital Adequacy Ratio (X1), Number of Board of Commissioner (X2), Number of Board of Directors (X3) as independent variables toward financial performance of Rural Bank (Y) as dependent variable in Indonesia either simultaneously or partially during 2015 to 2016.

The population in this study are all Rural Banks (BPR) operating in Indonesia according to Statistics of National Banking 2016. The sample was selected using purposive sampling obtained 50 BPRs with the largest total assets nationally. This study uses secondary data which is the BPR's financial report 2015-2016 published in Bank Indonesia Directory and Otoritas Jasa Keuangan websites. Hypothesis testing in this study using classical assumption test, multiple linear regression with 0,05, which determine, fit test model (F test), and t test with SPSS Program.

The results of this study indicate that partially, Capital Adequacy Ratio and the number of Board of Commissioners have significant positive effects to BPR financial performance, while the number of Board of Directors has a significant negative effect on the financial performance of BPR.

Keywords:

Corporate governance mechanism, financial performance, rural banks

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme Corporate Governance (CG) yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio (X1), Jumlah Dewan Komisaris (X2), Jumlah Board of Directors (X3) sebagai independen variabel terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Y) sebagai dependen variabel di Indonesia baik secara simultan maupun parsial selama tahun 2015 sampai 2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Indonesia menurut Statistik Perbankan Nasional 2016. Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh 50 BPR dengan total asset terbesar secara nasional. Penelitian ini

menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan BPR tahun 2015-2016 yang dipublikasikan dalam website Direktori Perbankan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda dengan $0,05$, koefisien determinasi, uji kecocokan model (uji F), dan uji t dengan Program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, *Capital Adequacy Ratio* dan Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan BPR, sedangkan Jumlah Board of Directors berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan BPR.

Kata Kunci :

Mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, BPR

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian dunia sekarang cenderung mengalami pelambatan. Daya saing Indonesia menurun dari peringkat 37 menjadi 41 dari total 138 negara berdasarkan laporan Indeks Daya Saing Global 2016-2017 yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) (Ekonomi.kompas.com, 2016). Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengungkapkan, sensus ekonomi yang dilakukan sejak 2016 menunjukkan besarnya potensi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Sensus ekonomi mencatat bahwa dari seluruh usaha yang berjalan di Indonesia, 98,33 persen di antaranya atau sebanyak 26,26 juta usaha tergolong ke dalam UMK. Sementara sisanya, 1,67 persen berskala usaha menengah besar (UMB) (Republika.co.id, 2016).

Masalah yang sering dihadapi oleh pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) lebih condong pada permasalahan internal, yaitu kurangnya aspek permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha. Sehingga para pelaku UKM harus pandai dalam mendapatkan modal melalui program pemerintah dan melalui kerjasama dengan lembaga khusus yang dapat membiayai dan mengembangkan usahanya. Lembaga khusus tersebut antara lain adalah Bank. Secara umum bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *banknote*, menerima simpanan uang dan meminjamkan uang (Kompasiana.com, 2017).

BPR didirikan berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR lebih ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Badan hukum BPR dapat berbentuk yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan setiap tahun kepada OJK. BPR harus segera mengimplementasikan peraturan tata kelola pada semua kegiatan dan seluruh tingkatan organisasi.

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, salah satu faktor utama terjadi krisis yang parah terjadi di Asia Tenggara yaitu lemahnya pengimplementasian dari sistem tata kelola perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Governance* (Dewayanto, 2010).

Memasuki empat bulan berjalan tahun 2016 kejadian penutupan BPR kembali ramai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup 4 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibat gulung tikar. OJK telah melikuidasi BPR Dana Niaga Mandiri (Makassar, Sulawesi Selatan) pada tanggal 13 April 2016 dan BPR Syariah (BPRS) Al Hidayah (Jawa Timur) pada tanggal 25 April 2016. Sebelumnya pada Januari 2016, OJK telah melikuidasi BPR Mitra Bunda Mandiri (Sumatra Barat) dan BPR Agra Arthaka Mulya (Yogyakarta) (Infobanknews.com, 2016).

Kejadian banyaknya penutupan BPR di Indonesia oleh OJK membuktikan bahwa industri perbankan di Indonesia sangat penuh dengan risiko, sehingga membutuhkan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Good Corporate Governance (GCG) menjadi peraturan yang mengatur hubungan antara seluruh pihak (internal dan eksternal) dalam perusahaan, berkaitan dengan kewajiban dan hak-hak mereka. Berbagai usaha mengenal istilah GCG yang menjadi semakin populer karena memberikan manfaat yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan pengambilan keputusan lebih baik, meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan, serta meningkatkan pelayanan *stakeholders* (FCGI, 2001). GCG menjadi salah satu faktor kesuksesan perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang, dan memenangkan global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Mekanisme *Corporate Governance* (CG) dalam upaya penegakan praktik CG pada perusahaan diharapkan dapat mampu mengontrol *agency costs* dan dapat mengurangi konflik keagenan (Iturriaga dan Sanz, 1998 dalam Suranta dan Machfoedz, 2003). Menurut Boediono (2005) mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengarahkan dan mengatur kegiatan operasional perusahaan dan pihak-pihak internal, agar dapat mengurangi masalah keagenan. Teori agensi menerangkan bahwa dalam asimetri informasi, pihak manajemen dapat mengambil suatu keputusan yang lebih memaksimalkan kepentingannya. Keputusan tersebut berbeda dengan keputusan yang diharapkan untuk memaksimalkan kepentingan para pemegang saham sehingga dapat mengurangi kinerja perusahaan. Agar kepentingan *principal* terpenuhi maka *principal* harus melakukan pengendalian yang tepat dalam membatasi tindakan agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Penelitian ini lebih banyak membahas secara mendalam mekanisme *good corporate governance* yaitu tentang Mekanisme Pemantauan Regulasi meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal yaitu Jumlah Dewan Komisaris dan Jumlah *Board of Directors*. Permodalan dalam Bank Perkreditan Rakyat sekarang tetap di atur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan No. 8/18/PBI/2006 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat tentang rasio kewajiban penyediaan modal minimum yaitu minimal 8% dari total aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Terdapat perubahan peraturan Bank Indonesia No. 8/18/PBI/2006 menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 /POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat tentang rasio kewajiban penyediaan modal minimum yaitu minimal 12% dari total aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR), namun peraturan OJK terbaru ini wajib dipenuhi BPR paling lambat 31 Desember 2019.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:562) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bagaimana kemampuan bank untuk mempertahankan modal yang cukup untuk mengontrol risiko yang dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu bank dalam usahanya menghasilkan laba. Semakin baik rasio kecukupan modal, berdampak pada meningkatnya nilai profitabilitas bank. Hasil penelitian James dan Joseph (2015) menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap kinerja Bank. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2010) dan Fanta *et al.* (2013) menghasilkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap ROA. Maka peneliti menarik hipotesis pertama yaitu

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia.

Dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan memonitor manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Dari hasil penelitian Purno dan Khafid (2013) didapatkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Sebaliknya dari penelitian yang dilakukan oleh Fidanoski *et al.* (2014) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat *good corporate governance* dan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang besar menguntungkan perusahaan dalam pengawasan terhadap dewan direksi. Maka peneliti menarik hipotesis kedua yaitu jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia.

Berkaitan dengan ukuran dewan direksi, hasil penelitian Fauzi dan Locke (2012) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan dan banyaknya jumlah dewan direksi akan meningkatkan kinerja perbankan. Sedangkan Uwigbe dan Fakile (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Maka peneliti menarik hipotesis ketiga yaitu jumlah *Board of Directors* (BOD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia.

Menurut SE OJK No.39/SEOJK.03/2017 untuk memenuhi aspek transparansi, Laporan Keuangan Publikasi BPR harus memuat pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan memuat rasio keuangan yaitu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non Performing Loan* (NPL) (neto), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Return on Assets* (ROA), Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Namun, dalam mengukur kinerja keuangan BPR dalam penelitian ini diukur dari rasio keuangan ROA sebagai indikator kinerja perbankan. *Return on assets* (ROA) menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Semakin besar nilai rasio ROA menggambarkan tingkat perolehan laba yang semakin besar sebagai indikator operasional BPR yang sudah efisien. ROA menandakan produktivitas aktual bank, sebagai ukuran kinerja bank (Pathan and Faff, 2013).

Andriyan dan Supatmi (2010) melakukan penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) swasta di Propinsi Jawa Tengah, penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh mekanisme CG (Kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors*, dan jumlah *board of directors*) terhadap kinerja perbankan yang memperoleh hasil dimana kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors* memiliki pengaruh negatif terhadap rasio NPL dan ROA, sedangkan jumlah BOD memiliki pengaruh negatif terhadap rasio LDR. Penelitian Dianita (2014) tentang mekanisme CG (Kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors*, dan jumlah *board of directors*) pada bank BPR swasta di Propinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa variabel mekanisme CG (kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors*) berpengaruh negatif terhadap ROA dan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio NPL, sedangkan jumlah BOD ditemukan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio LDR.

Mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu, dimana penelitian tersebut berfokus pada suatu provinsi di Indonesia, penelitian ini meneliti tentang BPR secara Nasional dengan obyek penelitian yaitu 50 BPR yang memiliki total aset terbesar Nasional yang beroperasi di Indonesia karena BPR dengan total aset terbesar memiliki resiko yang cukup besar sehingga diharapkan lebih mampu mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang lebih baik dibandingkan BPR dengan total aset yang lebih kecil. Penelitian ini berfokus pada mekanisme *Corporate Governance*, serta melihat pada fenomena yang terjadi terhadap banyaknya BPR di Indonesia yang ditutup karena lemahnya tata kelola perusahaannya sehingga penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh mekanisme

Corporate Governance terhadap kinerja keuangan BPR. Mekanisme CG dilihat dari Mekanisme Pemantauan Regulator meliputi persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*) dan Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi jumlah dewan komisaris dan jumlah *Board of Directors* (BOD). Kinerja keuangan BPR diukur berdasarkan *Return on Assets* (ROA).

METODE PENELITIAN

Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan model kausal. Populasi pada penelitian ini adalah semua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Indonesia menurut Statistik Perbankan Nasional 2016 berjumlah 1.637 BPR. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah *annual report* perusahaan perbankan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia tahun 2015-2016 yaitu bersifat kuantitatif dan dipublikasikan dalam website Direktori Perbankan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah BPR
1.	Semua BPR yang beroperasi di Indonesia	1637
2.	BPR yang tidak termasuk dalam peringkat 50 total aset terbesar Nasional periode November 2016.	(1587)
3.	BPR yang tidak mempublikasikan laporan tahunan berturut-turut untuk periode 31 Desember 2015-2016 di dalam website OJK dan BI.	0
4.	BPR yang tidak menghasilkan laba selama 2 tahun berturut-turut untuk periode 31 Desember 2015-2016 di dalam website OJK dan BI.	(1)
5.	Data tidak diungkapkan secara lengkap, baik data mengenai pengungkapan <i>Capital Adequacy Ratio</i> , pengungkapan jumlah dewan komisaris, pengungkapan jumlah <i>Board of Director</i> , dan total aset perusahaan dalam laporan tahunannya selama periode 2015-2016.	0
Jumlah Sumber yang digunakan dalam penelitian ini		49

Sumber: Laporan Tahunan Terpublikasi dari website BI dan OJK, 2017

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Selanjutnya untuk menghindari perbedaan interpretasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membuat definisi operasional dan cara pengukuran sebagai berikut:

1. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang menggambarkan kemampuan suatu bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam menjaga, memantau dan mengatur risiko-risiko yang muncul yang berpengaruh terhadap besarnya modal.

Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank BPR, penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “Sehat” dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100;
 - b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat “Kurang Sehat” dengan nilai kredit 65, dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0;
2. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk melakukan pengawasan dan memberikan pendapat kepada *Board of Directors* serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance*. Dewan komisaris memiliki wewenang dan bertanggung jawab memberikan pengarahan kepada manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, jumlah minimal Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat adalah:

- a. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.
- b. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Berikut rumus Jumlah Dewan Komisaris:

$$\text{Jumlah Dewan Komisaris} = \text{anggota dewan komisaris}$$

3. *Board of Directors* adalah Organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas operasional perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jumlah *board of directors* (BOD), adalah jumlah direksi yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, jumlah minimal Dewan Direksi pada Bank Perkreditan Rakyat adalah:

- a. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- b. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Berikut rumus Jumlah Dewan Direksi:

$$\text{Jumlah Dewan Direksi} = \text{anggota dewan direksi}$$

4. *Return On Assets* merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Pedoman surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank BPR menjelaskan bahwa *Return on Assets* (ROA) yaitu tingkat pengembalian yang dicapai perusahaan atas total aktiva yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki oleh BPR.

Berikut rumus *Return on Assets* (ROA):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Asset}}$$

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengambil sampel Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdaftar dalam Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016. Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi konstituen Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 49 BPR yang merupakan BPR dengan total aset terbesar Nasional sehingga diasumsikan telah menerapkan *Good Corporate Governance* yang lebih baik dibandingkan BPR dengan total aset yang lebih kecil.

Sebagai gambaran terhadap data sampel dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	98	11	53	20.49	9.320
Jumlah Dewan Komisaris	98	1	4	2.22	.566
Jumlah <i>Boards of Directors</i>	98	1	7	2.49	.944
<i>Return On Assets (ROA)</i>	98	1.41	6.82	3.7143	1.12381
<i>Valid N (listwise)</i>	98				

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas diketahui bahwa gambaran statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum (terendah), nilai maksimum (tertinggi), nilai rata-rata dan standar deviasi. Sesuai dengan tabel 5.2. di atas didapat jumlah N yang menggambarkan jumlah sampel sebanyak 98 BPR yang merupakan data panel dari 49 BPR dengan jangka waktu 2 tahun.

Capital Adequacy Ratio menunjukkan nilai terendah 11 dimiliki oleh PT. BPR Sri Artha Lestari, PT. BPR Padma, PT. BPR Citra Dumoga dan nilai tertinggi 53 dimiliki oleh PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung. Dari data di atas diketahui bahwa semua BPR telah memenuhi persyaratan *Capital Adequacy Ratio* yaitu minimum 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang telah ditetapkan dalam peraturan OJK.

Jumlah Dewan Komisaris menunjukkan nilai terendah 1 dimiliki oleh PD. BPR BKK Karangmalang, PD. BPR Bank Bantul, PD. BPR BKK Purbalingga, PD. BPR BKK Lasem dan nilai tertinggi 4 dimiliki oleh PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung dan PT. BPR Surya Y.kencana. Terdapat 4 BPR yang memiliki jumlah dewan komisaris sebanyak 1 orang, jumlah ini tidak sesuai dengan peraturan OJK yang menetapkan bahwa minimal jumlah dewan komisaris adalah 3 orang untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Jumlah *Boards of Directors* menunjukkan nilai terendah 1 dimiliki oleh PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung, PT BPR Arfak Indonesia, PT. BPR Delta Artha, PD. BP Kabupaten Dati II Lamongan dan nilai tertinggi 7 dimiliki oleh PD. BPR BKK Lasem. Terdapat 4 BPR yang memiliki jumlah *Board of Directors* sebanyak 1 orang, jumlah ini tidak sesuai dengan peraturan OJK yang menetapkan bahwa minimal jumlah Board of Directors adalah 3 orang untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Return on Assets (ROA) menunjukkan nilai terendah 1,41 dimiliki oleh PT. BPR Prima Multi Makmur dan nilai tertinggi 6,82 dimiliki oleh PT BPR Arfak Indonesia. Jumlah ROA yang telah dicapai oleh semua BPR sudah sesuai dengan peraturan OJK.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Berdasarkan nilai signifikan yang ditunjukkan pada hasil output SPSS 22 sebesar 0,975 dapat dinyatakan bahwa data adalah berdistribusi normal, karena memiliki nilai lebih besar dari taraf signifikan 0,05.

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kolinearitas ganda (korelasi yang tinggi) antara sesama variabel bebas yang digunakan dalam model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi di antara variabel bebas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>Variance Inflation Factor</i>
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X_1)	0,980	1,020
Jumlah Dewan Komisaris (X_2)	0,992	1,008
Jumlah <i>Board of Director</i> (X_3)	0,982	1,018

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. Karena semua pertimbangan dan syarat-syarat penelitian uji multikolinearitas sudah terpenuhi dimana semua variabel menunjukkan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1.

Uji heteroskedastisitas variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen (homokedastisitas). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan metode *Glejser*, yang dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X_1)	0,079	Tidak ada gejala
Jumlah Dewan Komisaris (X_2)	0,406	Tidak ada gejala
Jumlah <i>Board of Director</i> (X_3)	0,098	Tidak ada gejala

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa seluruh faktor penelitian pada variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, karena memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu (karena residual) pada periode t dengan periode t-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi. Model pengujian yang digunakan dengan uji *Durbin-Waston*.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

dL	dU	DW	4 - dU
----	----	----	--------

1,6086	1,7345	1,939	2,2655
--------	--------	-------	--------

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditentukan bahwa nilai *Durbin Watson* dalam model regresi sebesar 1,939 terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan data hasil penelitian dan output program SPSS, maka selanjutnya akan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Pengolahan Data

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig	Keterangan
Konstanta	2.654			
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X_1)	0,029	2,594	0,011	Signifikan
Jumlah Dewan Komisaris (X_2)	0,523	2,812	0,006	Signifikan
Jumlah <i>Board of Director</i> (X_3)	-0,284	-2,533	0,013	Signifikan
t_{tabel}	= 1,986			
R	= 0,428			
R Square	= 0,183			
Adjusted R Square	= 0,157			
F	= 7,013			
Sig. F	= 0,000 ^a			

Sumber : Data Diolah (2018)

1. Koefisien Determinasi

Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan alat uji statistik, maka akan diuraikan model summary statistik, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Nilai *R Square* dengan nilai 0,183 adalah R kuadrat, yang menunjukkan bahwa variabel independent yang diambil dalam penelitian ini memiliki tingkat hubungan dengan variabel dependent sebesar 18,3% sehingga selebihnya sebesar 81,7% adalah variabel-variabel lain yang tidak dikemukakan dalam penelitian ini.
- Nilai *Adjusted R Square* model regresi ini adalah sebesar 0,157 yang menunjukkan bahwa variasi atau naik-turunnya Variabel Dependen (Y) dipengaruhi oleh Variabel Independen (X) sebesar 15,7%.

Secara matematis model fungsi regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = 2,654 + 0,029X_1 + 0,523X_2 - 0,284X_3$$

2. Uji Kecocokan Model

Pengujian hipotesis pertama adalah dengan menganalisis secara simultan, yaitudengan uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atas variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F test ini dilihat berdasarkan output SPSS sebagai berikut:

Berdasarkan uji ANOVA atau F test, diperoleh angka F_{hitung} adalah 7,013 dengan angka Sig. 0,000. Untuk nilai F_{tabel} dapat dilihat pada kolom df, dimana pembilang adalah 3 dan angka penyebut adalah 94, sehingga didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 2,701. Perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} dapat diketahui bahwa angka F_{hitung} ternyata lebih besar dari F_{tabel} ($7,013 > 2,701$), dengan demikian dinyatakan bahwa variabel independen (X) secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hal itu juga dilihat berdasarkan nilai sig. F sebesar 0,000 berada di

bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang terbentuk termasuk kriteria cocok (*fit*).

3. Uji Parsial

Uji t ini adalah untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap *Return on Assets* (Y) adalah dengan menggunakan uji t pada *Level of Confidence* sebesar 95% atau = 5%.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia. Salah satu teori yang mendasari yaitu *agency theory*. *Agency theory* adalah hubungan antara *principal* dan agen. Teori agensi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara *principal* dan agen dalam mengurangi asimetri informasi dimana salah satu pihak memaksimalkan kepentingannya masing-masing.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dengan mekanisme *Corporate Governance* yang diwakili oleh *Capital Adequacy Ratio*, Jumlah Dewan Komisaris, dan Jumlah *Board of Directors* dapat meningkatkan kinerja BPR. Adapun uraiannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,594 dan tingkat signifikan sebesar 0,011. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (X_1) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,594 > 1,986$) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan ($0,011 < 0,05$). Arah pengaruh yang dihasilkan adalah positif, sehingga hasil uji hipotesis tersebut dapat dinyatakan H_a diterima dan H_0 ditolak, berarti bahwa terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu untuk meningkatkan labanya sehingga kinerja keuangan juga akan meningkat. Sehingga semakin baik rasio kecukupan modal, berdampak pada meningkatnya nilai profitabilitas bank. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2010), Sukarno dan Syaichu (2006), dan Fanta *et al.* (2013) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

BPR harus dapat menjaga CAR minimal 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Kemampuan Bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dapat mengontrol resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu bank dalam usahanya menghasilkan laba. Suatu bank dikatakan dapat menjalani kegiatan operasionalnya secara lancar apabila bank tersebut memiliki modal dan cadangan modal yang cukup, sehingga apabila bank mengalami kerugian atau penarikan dana yang mendadak dan besar oleh nasabahnya, maka BPR tetap dapat berada pada posisi aman. Para nasabah BPR akan lebih percaya untuk menipkan dan meminjam dana apabila BPR dapat menjaga rasio kecukupan modalnya.

2. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel Jumlah Dewan Komisaris (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,812 dan tingkat signifikan sebesar 0,006. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Dewan Komisaris (X_2) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,812 > 1,986$) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan ($0,006 < 0,05$). Arah pengaruh yang dihasilkan adalah positif, sehingga hasil uji hipotesis tersebut dapat dinyatakan H_a diterima dan

H_0 ditolak, berarti bahwa terdapat pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia. Jumlah dewan komisaris yang besar akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan BPR, dimana dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi dan mengarahkan para dewan direksi, semakin banyak dewan komisaris maka akan semakin banyak yang bertindak mengawasi para manajer sehingga masalah agensi dapat berkurang. Penelitian yang mendukung dengan hasil ini dilakukan oleh Kajola (2008) dan Fidanoski *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Jumlah dan kriteria dewan komisaris BPR sudah ada syarat peraturan *Corporate Governance* yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan modal inti yang dimiliki oleh BPR. BPR harus memiliki jumlah dewan komisaris yang optimal dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK dalam penunjukan dan penempatan Dewan komisaris. Dewan komisaris harus ditunjuk orang yang berkompeter dibidangnya dan memiliki pengetahuan tentang tugas komisaris serta mempunyai waktu untuk mengawasi dan mengarahkan, mengevaluasi pekerjaan direksi agar direksi dapat melaksanakan penerapan *Corporate Governance* BPR lebih baik. Apabila dalam pelaksanaan *Corporate Governance*, BPR tunduk pada syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan melaksanakan tugas sesuai peraturan OJK secara profesional maka hasil kinerja dewan komisaris akan berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan.

3. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel Jumlah *Board of Director* (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,533 dan tingkat signifikan sebesar 0,013. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor Jumlah *Board of Director* (X_3) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($-2,533 < 1,986$) dan besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan ($0,013 < 0,05$). Arah pengaruh yang dihasilkan adalah negatif (-) yang menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah, menandakan bahwa setiap peningkatan pada Jumlah *Board of Director* (X_3) akan berdampak terhadap penurunan *Return on Assets*, sehingga hasil uji hipotesis tersebut dapat dinyatakan H_a diterima dan H_0 ditolak, berarti bahwa terdapat pengaruh Jumlah *Board of Director* terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia. Jumlah *Board of Directors* yang besar cenderung membuat para anggotanya menjadi pasif dalam melakukan *monitoring* pada perusahaan sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan. Memiliki jumlah dewan yang lebih besar berdampak pada biaya yang tinggi dan dalam membuat keputusan menjadi sulit untuk berkordinasi dan komunikasi. Penelitian yang mendukung dengan hasil ini dilakukan oleh Uwigbe dan Fakile (2012), Rostami *et al.* (2016) dan Yermack (1996) menyatakan bahwa Jumlah *Board of Directors* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Jumlah *Board of Directors* telah ditetapkan oleh OJK sesuai dengan modal inti yang dimiliki oleh BPR. Jumlah BOD yang terlalu banyak mengakibatkan lamanya dalam mengambil keputusan bersama karena dalam menentukan kebijakan harus disetujui bersama dan biaya gaji dan tunjangan untuk BOD yang dikeluarkan BPR untuk jumlah BOD yang banyak dianggap terlalu tinggi sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan BOPO (Beban Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional) BPR yang berdampak pada menurunnya laba. BPR harus memiliki jumlah BOD yang optimal agar dapat lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan BPR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan analisis regresi berganda pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia selama periode 2015-2016, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia.
2. Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia.
3. Jumlah *Board of Directors* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia

Saran

1. Saran untuk penelitian selanjutnya:
 - Menggunakan data keuangan dengan periode waktu yang lebih terbaru di atas tahun 2015 untuk dapat membandingkan dan mengetahui pengaruh dari mekanisme *Corporate Governance* terhadap perubahan kinerja keuangan BPR.
 - Menggunakan variabel mekanisme *Corporate Governance* lain seperti karakteristik, tingkat jenjang pendidikan, tingkat pengalaman kerja, frekuensi agenda rapat pada Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi, Komite Audit, Direktur Kepatuhan apabila datanya memungkinkan tersedia.
 - Untuk dapat melihat pengaruh mekanisme *Corporate Governanc* terhadap rasio keuangan BPR, penelitian ini menggunakan data BPR seluruh Indonesia. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan data BPR untuk suatu wilayah tertentu di Indonesia seperti Indonesia bagian Timur, Indonesia bagian Barat, maupun meneliti tentang BPR dalam 1 Propinsi di Indonesia.
2. Saran untuk pihak manajemen:
Manajemen BPR harus memperhatikan aspek kecukupan modal yang di syaratkan oleh pemerintah dan pengawas Otoritas Jasa Keuangan juga total asset yang dimiliki, karena setiap satu persentase kenaikan jumlah *Capital Adequacy Ratio* atau asset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangan BPR yang diukur dari rasio *Return on Assets*.
3. Saran untuk para pemegang saham BPR:
Untuk meningkatkan kinerja keuangan BPR, para pemegang saham BPR diharapkan lebih memperhatikan jumlah dewan komisaris dan jumlah *Board of Directors* yang optimal agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pemegang saham BPR juga harus memperhatikan kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki oleh para Dewan Komisaris dan para Dewan Direksinya sehingga dapat memahami kondisi BPR dan perkembangan perekonomian saat ini. Dengan kondisi tersebut, diharapkan BPR dapat bersaing dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya sehingga BPR menjadi lebih maju serta dapat mencapai tujuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Okky dan Supatmi, 2010, *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 7. No. 2. pp. 187-204.
- Dewayanto, Totok, 2010, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, Dalam Fokus Ekonomi, Volume 5, No. 2 Desember 2010: 104-123
- Dianita, Mirna, 2014, *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol 4, No.1,1317-1327.
- Fanta, Ashenafi Beyene *et al.*, 2013, *Corporate Governance and Impact on Bank Performance*, Journal of Finance and Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 19-26. doi: 10.11648/j.jfa.20130101.12
- Fauzi, Fitriya Dan Stuart Locke, 2012, *Board Structure, Ownership Structure and Firm Performance: A Study of New Zealand Listed-Firms*, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol. 8(2), 43-67.
- Fidanoski, F., *et al.*, 2014, *Corporate Governance and Bank Performance: Evidence from Macedonia*. EA, Vol. 47, No, 1-2, 76-99.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001, *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*, Edisi Ketiga, Jakarta: Prentice Hall.
- James, Bernadette Josephine & Corina Joseph, 2015, *Corporate Governance Mechanisms and Bank Performance: Resource-based View*, Procedia Economics and Finance. Volume 31 Pages 117-123.
- Jensen, M.C., & W.H. Meckling, 1976, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
- Kajola, S.O., 2008. *Corporate governance and firm performance: The case of Nigerian listed firms*. European journal of economics, finance and administrative sciences, 14(14), pp.16-28.
- Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Pathan, S. & Faff, R, 2013, *Does Board Structure In Banks Really Affect Their Performance?* Journal of Banking & Finance, 37, 1573-1589.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/18/PBI/2006, *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat*.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006, *Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, *Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 /POJK.03/2015, *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat*.

Purno, Bambang Listyo & Khafid, Muhammad, 2013, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan*, Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.

Rostami, Shoeyb *et al.* 2016, *The Effect of Corporate Governance Components on Return on Assets and Stock Return of Companies Listed in Tehran Stock Exchange*, *Procedia Economics and Finance* 36, 137 – 146.

Sukarno, Kartika Wahyu & Muhamad Syaichu, 2006, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia*, *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*. Vol. 3, No. 2.

Suranta, Eddy & Mas'ud Machfoedz, 2003, *Analisis Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan, Investasi, dan Ukuran Dewan Direksi*, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal. 214 – 226.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Diunduh pada tanggal 12 Maret 2017, www.bpkp.go.id.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Uwuigbe, O.R. & Fakile, A.S, 2012, *The effects of board size on financial performance of banks: A study of listed banks in Nigeria*, *International Journal of Economics and Finance*, 4(2), 260-267.

www.bi.id

www.ojk.id

<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/02/190000126/bi.kondisi.perekonomian.indonesia.2017.mengejutkan>. (diakses tanggal 15 Maret 2017)

<http://infobanknews.com/bpr-ditutup-lagi-lagi-karena-fraud/> (diakses tanggal 17 Maret 2017)

https://www.kompasiana.com/arthakusuma/peranan-lembaga-keuangan-bank-dalam-perkembangan-ukm_5879293ab793733c0b4ea5a6 (diakses tanggal 6 Desember 2017)

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/27/op27wu382-hasil-sensus-ekonomi-2016-perdagangan-dominasi-perekonomian> (diakses tanggal 11 April 2017).